

Karya sastra sebagai sarana literasi politik: Novel "Bungkam Suara" karya J. S. Khairen sebagai narasi melawan propaganda terkomputasi

Charisse Renica Benedicta Awa^{1*}, Febby R. Widjayanto²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

*E-mail: charisse.renica.benedicta-2020@fisip.unair.ac.id

Abstract: This research examines the use of literary works as a means of political literacy, specifically as a response to computational propaganda as a major challenge in the politics of the 21st century. Various previous studies regarding political literacy put emphasis on formal institutional approaches through formal education in schools which have numbers of problems, such as time, limited access, and state indoctrination. This research explores how reading texts helps citizens to read social phenomenon by reviewing theories regarding political literacy and critical literacy by using interpretive content analysis method which involves author's interpretation. The analysis shows the harmony between the narrative in the novel "Bungkam Suara" with various studies on computational propaganda and "Bungkam Suara" as counter-narrative to computational propaganda by raising readers' awareness of their relation as netizens to the computational propaganda. Therefore, literary works can serve as an alternative in political literacy by providing different perspectives and building citizens' critical thinking over politics.

Keywords: Political literacy, critical literacy, computed propaganda, literary works, hegemony.

PENDAHULUAN

Dinamika demokrasi dalam kurun waktu satu dekade terakhir diwarnai perkembangan pesat media sosial yang menawarkan akses yang luas untuk mengumpulkan data, pengetahuan, jaringan sosial, dan kesempatan membangun partisipasi kolektif, serta dapat membangun demokrasi yang lebih baik (Howard, 2015; Margetts et al, 2015 dalam Woolley dan Howard, 2019). Media sosial menjadi wadah bagi terlaksananya ruang diskusi publik yang baru, penyebaran pengetahuan politik (Andriadi, 2017), serta aksi-aksi politik dan partisipasi warga dalam demokrasi (Woolley dan Howard, 2019). Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif. Algoritma media sosial memicu polarisasi dalam diskursus publik karena menciptakan 'echo chamber' (bubble) (Lorenz-Spreen et al, 2022; Kuehn & Salter, 2020), serta mendorong konten sensasional (Woolley & Howard, 2017).

Woolley dan Howard (2019) menyebut media sosial digunakan sebagai alat untuk melemahkan demokrasi melalui usaha yang terkoordinir. Fenomena ini disebut propaganda terkomputasi, yaitu penggunaan algoritma, otomasi, dan kurasi secara sengaja untuk mengolah dan menyebarkan informasi yang menyesatkan di media sosial. Pemerintah dan berbagai aktor politik menggunakan propaganda terkomputasi untuk memperkuat agenda mereka dan melemahkan oposisi (Rahmawati, 2022; Woolley dan Howard, 2019). Eskalasi propaganda terkomputasi dapat menciptakan polarisasi politik (Pérez-Escolar, Lilleker, dan Tapia-Frade, 2023; Tambuscio et al., 2015 dalam Muñiz-Velázquez, 2023).



Secara spesifik, propaganda terkomputasi melakukan imitasi terhadap perilaku pengguna media sosial, sehingga pesan serta interaksi yang dihasilkan terkesan natural. Martin et. al. (2020) menjelaskan bahwa propaganda terkomputasi sulit dideteksi karena kompleksitas yang ada di dalamnya.

Karenanya, maraknya disinformasi menjadi ancaman bagi demokrasi, bahkan World Economic Forum pada 2014 telah menetapkan penyebaran misinformasi online sebagai salah satu dari 10 ancaman terbesar terhadap masyarakat (Woolley & Howard, 2019). Disinformasi berperan besar dalam membentuk opini dan perilaku publik serta menggerakkan partisipasi politik warga (Muñiz-Velázquez dan Antonio, 2023). Ini terjadi karena seseorang menjadikan media sosial sebagai referensi utamanya dalam membuat keputusan (Mayo, 2015). Disinformasi dalam demokrasi dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, proses pemilihan umum, dan referendum (Muñiz-Velázquez, 2023). Publikasi ilmiah terkait disinformasi dan misinformasi dalam bidang politik dan demokrasi dalam kurun waktu 2014-2020 mencapai 21,4% dari keseluruhan publikasi yang ada (152 artikel), kedua tertinggi setelah publikasi ilmiah serupa di bidang kesehatan (Pérez-Escolar, Lilleker, dan Tapia-Frade, 2023).

Fenomena berita palsu dan propaganda terkomputasi mulai banyak dibicarakan sejak kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2016. (Pérez-Escolar, Lilleker, dan Tapia-Frade, 2023; Silverman dan Singer-Vine, 2016 dalam Woolley dan Howard, 2019; Farkas dan Schou, 2018) Selain itu, propaganda terkomputasi juga terjadi di Inggris melalui Twitter dalam referendum Brexit (Woolley & Howard, 2017; Howard & Kollanyi, 2016; King, 2019), Filipina melalui propaganda TikTok yang melakukan pembelokan sejarah (Mendoza, 2022), dan di Indonesia dalam Pilpres 2019 (Widjayanto, Naim, dan Mokodenseho, 2022) dan Pilkada DKI Jakarta 2017 (Syaefullah & Perdana, 2019; Utami, 2018).

Propaganda terkomputasi menjadi berbahaya karena demokrasi dijalankan atas dasar kabar burung, konspirasi, dan kebohongan (Hui, 2020). Secara konsekuen, hoaks berpotensi menumbuhkan sikap politik partisan yang berbahaya karena membuat orang menghindari fakta (Utami, 2018). Dengan angka pengguna media sosial yang mencapai 191 juta orang dan rata-rata durasi penggunaan internet 8,5 jam per hari (We Are Social, 2022), Indonesia rentan terhadap propaganda terkomputasi. Secara umum, masyarakat Indonesia memahami bahwa hoaks merusak demokrasi (Hui, 2020). Perkembangan media sosial dan propaganda terkomputasi menjadikan ruang publik mengalami pergeseran makna dari ruang fisik ke ruang virtual (Flint, 2006). Pergeseran konteks ini menjadikan bahasa berperan sentral, sebagai sumber berbagai konsep, ide, dan metafora yang krusial (Ives, 2004).

Laporan UNESCO (2014) yang berjudul *Teaching and learning: Achieving quality for all* menyatakan pendidikan sebagai komponen penting dalam membangun demokrasi karena mendorong kemampuan berpikir kritis (UNESCO, 2014; King, 2019). Mayo (2015) menjelaskan bahwa literasi berperan memberdayakan warga agar dapat memanfaatkan hak-hak kewarganegaraannya dengan baik. Heryanto

(2021) dalam Strategi Literasi Politik: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Praktis juga menjelaskan peran krusial literasi, khususnya literasi politik. Kunci dari kesadaran demokrasi yang baik adalah kemampuan berpikir kritis mengenai informasi, dan pendidikan kritis serta literasi digital adalah solusi (King, 2019). Namun, literasi digital dan regulasi platform digital tidak cukup sebagai satu-satunya sarana literasi politik (Hui, 2020). Literasi digital dan pendidikan kritis bersifat terbatas dan memakan waktu yang lama (Jeffrey, Hegarty, & Kelly, 2011; UNESCO 2014). Institusi pendidikan kerap gagal melakukan identifikasi, asesmen, dan penguatan kemampuan literasi digital kritis (Murray & Pérez, 2014) dan seseorang yang terpapar teknologi secara masif tidak serta merta memiliki kemampuan literasi digital yang juga baik (Murray & Pérez, 2014; Jeffrey, Hegarty, & Kelly, 2011). Mengandalkan institusi pendidikan yang sudah ada tidaklah cukup. Di Indonesia, The Political Literacy Institute melakukan berbagai agenda literasi politik dengan kelompok sasaran yang beragam (Heryanto, 2021). Namun, bentuk literasi politik ini juga masih terbatas dari sisi waktu, cakupan peserta, materi (Sutisna, 2017). Karena itu, diperlukan cara baru dalam melakukan literasi politik yang dapat mengisi kekurangan bentuk-bentuk literasi politik yang sudah ada.

Pembahasan tentang literasi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bahan bacaan, salah satunya karya sastra. Blaiha (2019) menjelaskan bahwa sastra dan politik saling berkaitan. Situasi politik yang sedang berlangsung berpengaruh besar terhadap karya seni yang dihasilkan, meliputi karya sastra (Sambodja, 2008). Dalam aliran Marxisme, kesadaran individu dan manifestasi karya sastra yang dihasilkannya tidak lepas dari situasi politik yang ada. Sastra adalah ruang terbuka bagi segala pengetahuan yang diciptakan manusia, sehingga sastra dapat menangkap konteks apa pun (Blaiha, 2019). Sejak masa lampau, karya sastra telah menjadi corong bagi argumen intelektual dalam kehidupan sosial-politik. Karya sastra yang awalnya menjadi sarana indoktrinasi bergeser menjadi penggambaran situasi sosial secara gamblang (Lindberg, 1968; Kroll, 1960). Perubahan fundamental dalam lanskap politik di abad ke-21 membuat karya sastra kembali relevan, karena perubahan situasi politik akan menghasilkan gelombang karya sastra baru yang khas sesuai zamannya. Karya sastra telah lama memainkan peran penting dalam kehidupan politik, baik di luar negeri maupun Indonesia (Sambodja, 2008; Taum, 2020).

Karya sastra menyusun atau menghapus tabu, konvensi, dan prasangka sosial sehingga berkontribusi terhadap perubahan nilai yang akan berdampak pada perubahan sosial dan politik (Lindberg, 1968). Salah satu contoh karya sastra yang fenomenal pada abad ke-20 karena sarat akan kritik sosial adalah *Animal Farm* dan 1984 karya George Orwell, yang satir politik yang mengkritik pemerintahan yang bersifat otoritarian. Akan tetapi, kebanyakan penelitian yang melibatkan karya sastra sebagai objek masih berkuat seputar unsur-unsur intrinsik dalam karya tersebut (Hastuti, 2018; Suparman, 2018; Nudin, Putro, dan Yusar 2021; Rizkia & Nurfaidah, 2023) dan belum banyak membahas mengenai bagaimana karya tersebut digunakan sebagai sarana kritik sosial atau pun sebagai media literasi politik

dalam merespons isu yang diangkat dalam karya tersebut. Oleh karena itu, pokok pembahasan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah penggunaan karya sastra sebagai sarana literasi politik, dan propaganda terkomputasi sebagai isu yang direspons. Karya sastra yang akan diulas dalam penelitian ini adalah sebuah novel politik berjudul "Bungkam Suara" karya J. S. Khairen. "Bungkam Suara" merupakan bentuk kritik J. S. Khairen atas orang-orang yang suka berkomentar negatif dan memuji-muji pemerintah. (Metrum, 2023). Karya fiksi bisa dinikmati semua orang, sehingga pesan-pesan yang serius dapat disampaikan dengan ringan (Jumpa Online, 2023). Fokus penelitian adalah mengulas karya sastra sebagai sarana literasi politik dan bagaimana narasi (counter-narrative) terhadap propaganda terkomputasi dibangun dengan menggunakan karya sastra sebagai sarannya.

KERANGKA TEORI

Literasi Politik

Terminologi literasi politik pertama kali muncul dalam sebuah esai yang ditulis Bernard Crick (1969). Crick menjelaskan pentingnya memperkenalkan politik di bangku sekolah. Esai tersebut memunculkan banyak ide yang kemudian dibukukan dalam *Political Education and Political Literacy* oleh Crick dan Porter pada 1978, dan ini yang menjadi dasar dari program pendidikan kewarganegaraan. Pada 1969, yang ditekankan adalah pengajaran politik, kemudian berubah menjadi pendidikan dan literasi politik, dan hari ini pendidikan kewarganegaraan (Davies, 2008). Literasi politik dijelaskan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara dalam mengartikulasi kepentingan politik. Dalam istilah literasi politik, kata "literasi" seringkali bersifat metafor, kurang memiliki makna yang jelas. Crick (1978) dalam Davies (2008) menyatakan bahwa politik berkaitan dengan kepentingan dan ide-ide, sehingga pemahaman akan politik harus berangkat dari pemahaman akan konflik yang ada, penyebabnya, dan kepentingan mereka yang berkontestasi. Seseorang dengan literasi politik yang baik dapat menilai dengan jelas sengketa politik yang terjadi, nilai-nilai yang dipegang oleh para kontestan, dan bagaimana dampaknya terhadap dirinya, sehingga ia akan mencoba melakukan sesuatu untuk meresponnya dengan cara yang efektif dan penuh hormat. Cassel dan Lo (1997) menjelaskan bahwa meskipun literasi politik tidak dapat diukur secara rinci, seseorang yang memiliki literasi politik yang baik dapat memahami perbedaan partai dan mengetahui konsep-konsep dasar dan fakta politik. Pemilih harus memiliki pemahaman agar dapat menjaga kontrol publik terhadap penguasa sehingga literasi politik menjadi pusat teori empiris dalam kajian demokrasi.

Pada awalnya, literasi politik banyak dikaitkan dengan peran pendidikan formal melalui pemberian mata pelajaran yang berhubungan dengan kewarganegaraan, dengan tujuan membangun pemilih yang cerdas agar tercipta pemilihan umum yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendorong kematangan demokrasi. Salah satu dokumen awal dari berkembangnya pandangan ini adalah publikasi *Education for citizenship and the teaching of democracy in schools* atau yang lebih dikenal dengan

nama Crick Report pada 1998 (Hopkins dan Koster, 2019). Sutisna (2017) menjelaskan bahwa pemilu yang berkualitas mensyaratkan pemilih yang cerdas dan kritis, yang tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan kesadaran elektoral, melainkan independensi. Pemilih dengan literasi politik yang rendah akan mudah dimobilisasi rezim otoriter untuk mempertahankan status quo. Para ilmuwan politik sejak lama telah menyimpulkan keterkaitan yang kuat antara pendidikan dengan kecenderungan untuk memilih dan terlibat dalam bentuk partisipasi politik lainnya. Studi menyatakan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat demokrasi (Lipset, 1959; Przeworski, 2000 dalam Heryanto, 2021).

Pengetahuan politik memang menjadi prasyarat penting untuk partisipasi politik, tetapi informasi saja tidak cukup. Informasi tersebut harus dilengkapi dengan konteks agar terbangun literasi politik yang baik (Dudley dan Gitelson, 2003). Bernard Crick (2000) dan R. Gilbert (2006) dalam Heryanto (2021) menjelaskan bahwa literasi politik tidak sebatas bagaimana melakukan transfer pengetahuan politik kepada masyarakat sipil, melainkan mencakup upaya untuk membangun masyarakat yang aktif dan dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan publik. Terdapat beberapa teori mengenai pendidikan dan keterlibatan politik yang membuat kedua faktor tersebut relevan terhadap literasi politik, yaitu mobilisasi kognitif, tekanan melalui peran lingkungan, atau pengaruh agen dalam institusi-institusi sosial. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha untuk mengajarkan literasi politik di sekolah, oleh karena itu pemahaman akan perkembangan literasi politik akan memiliki implikasi praktis terhadap pendidikan masyarakat (Cassel dan Lo, 1997).

Literasi politik adalah hasil dari keterlibatan politik yang didorong oleh taraf sosial, kemampuan, dan sosialisasi oleh orang tua (Cassel dan Lo, 1997). Dalam hal ini, keterbukaan pikiran menjadi elemen penting, karena literasi politik mendorong terjadinya diskusi yang sehat, yang tidak bersifat mendikte pilihan politik seseorang (Davies, 2008). Aspek lainnya yang dapat menjadi indikator adalah kemampuan seseorang menggunakan informasi yang kontekstual mengenai sebuah isu untuk mendukung argumennya dan menunjukkan level pemahaman konseptual yang lebih luas. Kehati-hatian diperlukan agar masyarakat tidak secara tanpa sadar bergerak ke dalam situasi di mana semakin sulit untuk mempertahankan argumen yang berbasis bukti (Davies, 2008). Wilkinson (1991, dalam Jurs, 2014) menyatakan bahwa partisipasi politik yang dilakukan seseorang dapat memfungsikan masyarakat dan pengetahuan politik dapat mendorong pada partisipasi politik, atau setidaknya meningkatkan literasi politik. Jurs (2014) mengkategorikan kompetensi literasi politik ke dalam tiga kategori:

1. Pengetahuan: mengenai asal-usul demokrasi, sistem politik dan penjelasannya dalam konteks luas, kesempatan melakukan partisipasi politik, sejarah negara;
2. Kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan bentuk partisipasi politik lainnya, kerja sama dan mempertahankan opini dengan fakta dan argumen;

3. Pemahaman akan nilai, menghargai dan menerima perbedaan politik, status sosial-ekonomi, agama, dan kepercayaan adat orang lain.

Westholm et al. (1990) dalam Sutisna (2017) menyatakan bahwa pada dasarnya literasi politik adalah suatu kompetensi warga negara yang dibentuk agar seorang warga negara siap menjalankan perannya dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, literasi politik memiliki elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan diukur, seperti yang dijelaskan Madhok (2005) yang dikutip dalam Sutisna (2017), yaitu:

1. Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik, kewenangan, dan perannya;
2. Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik;
3. Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik;
4. Partisipasi dalam kegiatan politik.

Akan tetapi, gagasan pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan warga negara dikritik oleh Biesta dan Lawy (2006). Kewarganegaraan adalah praktik yang dilakoni seseorang, yaitu praktik mengidentifikasi isu-isu publik yang menjadi perhatian umum. Proses berwarga negara adalah transformasi, melalui proses penilaian dan pertanyaan kritis untuk memahami dan mengekspresikan tempat dan peran mereka dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Hopkins dan Koster (2019) menyatakan bahwa literasi politik selama ini menjadi usaha untuk menciptakan program belajar yang menitikberatkan tanggung jawab individu dan kohesi sosial di atas kebutuhan murid untuk mengkritik masyarakat dalam konteks tertentu. Padahal, pengertian warga negara yang “aktif” tidak serta merta didapat, namun membutuhkan analisis yang dilakukan anak muda sebagai bagian dari penelusuran mereka atas literasi politik itu sendiri. Menjadi warga negara tidak cukup hanya mengakuisisi sejumlah nilai dan disposisi paten tertentu (Biesta & Lawy, 2006).

Lebih lanjut, Hopkins dan Koster (2019) menjelaskan bagaimana perdebatan mengenai konsensus dan keberagaman telah mempengaruhi gagasan mengenai apa yang seharusnya menjadi unsur literasi politik di institusi pendidikan. Goodin (2003, dalam Eriksen, 2020) menjelaskan bahwa mengembangkan literasi politik tidak cukup dengan memberi setumpuk pengetahuan, namun memiliki kompetensi moral. Dalam hal ini, inti dari literasi bukanlah memiliki jawaban yang benar, tetapi kemampuan untuk membentuk penilaian politik secara bertanggung jawab (Eriksen, 2020). Demokrasi menuntut pertanyaan terus-menerus mengenai makna dari kewarganegaraan demokratis, karenanya pendidikan kewarganegaraan harus menjadi tempat di mana pertanyaan-pertanyaan itu muncul (Biesta & Lawy, 2006).

Literasi politik tidak hanya soal membaca dan menulis, namun merujuk pada jenis pengetahuan tertentu yang membutuhkan eksaminasi (Madhok, 2005). Biesta & Lawy (2006) menjelaskan bahwa warga negara yang aktif dicontohkan dengan budaya partisipasi. Literasi politik lebih dilihat sebagai bagian dari praksis daripada subjek akademik. Oleh karena itu, Madhok (2005) menyatakan literasi politik sebagai indikator otonomi yang penting dalam kondisi subordinasi. Menurutnya, literasi politik terkait erat dengan:

1. Otonomi melalui kemampuan, yaitu kemampuan membuat keputusan politik yang meliputi pelibatan dan identifikasi alasan memilih.
2. Kepedulian dan partisipasi warga negara.
3. Memiliki bentuk pengetahuan tertentu. Pengetahuan yang dimaksud memiliki beberapa perbedaan dengan pendidikan yang didesain untuk kewarganegaraan demokrasi. Perbedaan-perbedaan itu antara lain:
 - a. hal tersebut tidak selalu diasosiasikan dengan bersekolah;
 - b. otonomi yang dibangun dari pengetahuan tertentu yang ada dalam individu berbeda dengan warga otonom yang ingin dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. atribut-atribut kewarganegaraan yang dimaksud berbeda dengan yang dimiliki warga melek politik di bawah subordinasi.

Di Indonesia sendiri, upaya literasi politik yang dilakukan secara sistematis dapat ditelusuri jejaknya setelah kemerdekaan melalui pemberian Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Tiga isu kunci yang ada dalam literasi politik Indonesia adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. (Heryanto, 2021). Namun, proyek pendidikan politik ini tidak berjalan baik. Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 16-18 Oktober 2023 menunjukkan 52,1% responden menilai proses pendidikan politik di Indonesia belum berjalan lancar. Padahal, berjalannya sistem demokrasi secara utuh bergantung pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan (Gitiyarko, 2024). Pendidikan politik Indonesia melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak selaras dan justru berjalan ke arah yang sebaliknya.

Pendidikan Kewarganegaraan kerap menjadi bentuk indoktrinasi dan hanya berfokus pada pengetahuan (Widiatmaka, 2016). Ini terjadi baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun reformasi. Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Kewarganegaraan sangat rentan terhadap bias politik penguasa. Kesadaran kritis warga tidak ditumbuhkan, melainkan dipangkas melalui sosialisasi Pancasila yang menjadi instrumen dogmatis aparat negara (Mulyono, 2017; Kusman, 2017). Di era reformasi sekali pun, pendidikan politik masih belum lepas dari bentuknya yang indoktrinatif. Pelaksanaannya yang bersumber dari negara membuat pendidikan politik rentan terhadap indoktrinasi dan kepentingan rezim,

meskipun negara menganut sistem demokrasi (Setiarsih, 2017; Hopkins dan Koster, 2019). Dudley dan Gitelsen (2003) mengungkap bahwa program-program yang mendorong pendidikan dan partisipasi politik kerap menimbulkan pertentangan pandangan mengenai bagaimana sikap warga negara yang baik dan seperti apa bentuk pendidikan politik yang dapat diterima. Praktik pengajaran pendidikan politik juga memainkan peran dalam hal ini (Widiatmaka, 2016). Tidak ada proses dialogis dan berpikir kritis untuk saling mengkritik, padahal pendidikan kritis dan rasionalitas penting untuk membangun karakter peserta didik yang kritis dan demokratis dalam merespons perkembangan zaman (Setiarsih, 2017).

Propaganda Terkomputasi

Studi awal dari propaganda terkomputasi banyak disebut berasal dari 'propaganda model' yang dicetuskan oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky. Herman dan Chomsky menjelaskan bagaimana 'model propaganda' banyak bergantung pada media dalam membangun persetujuan publik terhadap kebijakan yang ada (Mayo, 2015). Model ini dijelaskan dalam buku *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Kedua tokoh tersebut meringkas model propaganda melalui beberapa fitur yang dimilikinya, yaitu: (1) kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi; (2) iklan sebagai penghasil utama media; (3) ketergantungan media terhadap informasi dari pemerintah, bisnis, dan ahli yang didanai sumber kekuasaan primer tersebut; (4) 'flak', atau pendisiplinan media; dan (5) antikomunisme sebagai mekanisme kontrol (Fuchs, 2018).

Secara ringkas, propaganda terkomputasi dapat diartikan sebagai penggunaan algoritma, otomasi, dan kurasi secara sengaja untuk melakukan distribusi informasi yang menyesatkan melalui jejaring media sosial (Woolley & Howard, 2017). Propaganda terkomputasi melibatkan aktivitas mempelajari dan meniru karakteristik manusia di media sosial untuk melakukan manipulasi terhadap opini publik dalam berbagai platform dan jejaring sosial yang berbeda. Mereka dapat menyebarkan pesan secara cepat, berinteraksi dengan konten pengguna lainnya, dan mempengaruhi trending media sosial dengan kecepatan melebihi manusia (Woolley & Howard, 2017). Perkembangan media digital (termasuk media sosial) secara pesat telah meningkatkan penyebaran berita palsu, terutama dengan berkembangnya *infodemic* (pandemi informasi menyimpang) yang terdiri dari disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Lim (2023) menjelaskan perbedaan ketiganya berdasarkan intensi penyebaran berita dan pengetahuan pengirim berita tersebut atas keabsahannya. Disinformasi adalah berita palsu yang disebarkan sekalipun pengirimnya mengetahui bahwa berita tersebut salah. Misinformasi adalah berita palsu yang disebarkan oleh pengirimnya karena mispersepsi pengirim bahwa berita tersebut benar sehingga berpotensi menyesatkan, sedangkan malinformasi adalah berita asli yang disebarkan dengan intensi yang buruk, misalnya menebar kebencian. Sejalan dengan argumentasi tersebut, Farkas dan Schou (2023) juga membedakan disinformasi dan misinformasi berdasarkan sengaja tidaknya informasi tersebut disebarkan: disinformasi disebarkan secara sengaja dan bertujuan menyesatkan, sedangkan misinformasi tidak.

Penggunaan bot media sosial untuk melakukan manipulasi politik adalah sarana yang efektif dalam melakukan propaganda daring dan menyebarkan kampanye gelap. Sekelompok kecil orang dapat memanfaatkan bot media sosial, misalkan, untuk mengangkat isu tertentu dan menaikkannya ke dalam daftar trending, menggunakan propaganda terkomputasi untuk memberikan ilusi bahwa terjadi konsensus skala besar (Farkas & Schou, 2018). Keberadaan media sosial mengubah kampanye politik. Pesan publik yang besar perlahan digantikan pesan-pesan yang ditujukan pada demografi spesifik dengan presisi tinggi, namun tidak nampak bagi orang lain. Fenomena kabar palsu dan post-truth adalah gejala dari berkembangnya argumen secara cepat hingga pada titik ketika hanya penilaian dangkal yang mungkin dilakukan (Davies, 2018).

Riset mengenai propaganda terkomputasi perlu melihat sistem kuasa dan pengetahuan yang menyusunnya (Woolley & Howard, 2019). Propaganda terkomputasi, misalnya, dapat dilakukan negara untuk melakukan pembungkaman terhadap oposisi dengan menggunakan bot untuk berpura-pura menjadi warga sungguhan. Dalam kampanye politik, propaganda terkomputasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih atau menampik kritik dengan cara yang tidak seharusnya – kabar dusta, misinformasi yang dikondisikan, dan pasukan troll di dunia maya untuk menyerang kelompok-kelompok tertentu. Para aktor politik dapat mempersenjatai dirinya untuk melakukan manipulasi dan mengamplifikasi informasi yang tidak faktual di dalam dunia maya (Woolley & Howard, 2017). Selain perbedaan dalam media dan skala penyebarannya dengan propaganda konvensional, propaganda terkomputasi berkembang pesat karena meredupnya rasionalitas dan objektivitas yang digantikan perasaan. Dunia modern dibangun atas batas antara tubuh dan pikiran, yang berkembang menjadi perbedaan antara fakta dan perasaan Davies (2018).

Demokrasi pada abad ke-20 didasarkan pada rasionalitas. Namun, dengan menurunnya kepercayaan terhadap media, kekuatan statistik dalam memfasilitasi kesepakatan dan kepercayaan berada dalam bahaya, karena hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan atau waktu untuk mengecek sumber data dan analisis pakar yang asli. Akibatnya, kampanye dan agenda yang muncul tanpa kredibilitas ekonomi atau statistik meraih kesuksesan. Dalam hal ini, kebenaran menjadi isu politis. Sejak awal 2000-an, media sosial melengkapi (dan dalam beberapa hal, mengkooptasi) demokrasi dengan bentuk komunikasi dari banyak orang ke banyak orang, yang membuat informasi bergerak layaknya virus. Kecepatan reaksi lebih diutamakan ketimbang asesmen yang berhati-hati, sehingga masyarakat berakhir lebih mempercayai emosi dan sensasi ketimbang bukti. Perubahan tersebut mengakibatkan media tidak lagi menyajikan fakta, dan lebih banyak menyamakan atensi dan emosi dari publik penonton. Kecelakaan atau kesalahpahaman kecil dibesar-besarkan dengan cepat karena kombinasi imajinasi paranoid dan media sosial (Davies, 2018). Dalam attention economy, ekspresi kemarahan menarik lebih banyak perhatian daripada ketenangan dan rasionalitas. Teks dapat menyebar lebih luas dan cepat ketika mengandung ‘emosi moral’ yang tinggi (Brady et al., 2016).

Perasaan tertentu memiliki potensi politik yang lebih besar, seperti nostalgia, kebencian, kemarahan, dan ketakutan yang dapat mendisrupsi status quo. Kebangkitan populisme, seperti kemenangan Donald Trump dan Brexit serta gelombang nasionalisme di Eropa adalah contoh dari hal ini (Davies, 2018). Ini menjelaskan bagaimana menguatnya algoritma dapat berujung pada menguatnya populisme. Sebuah studi mengenai propaganda daring mengidentifikasi tiga puluh negara di dunia, termasuk Rusia dan China, yang terlibat dalam penggunaan media sosial yang disengaja untuk memanipulasi opini publik dan perilaku memilih (Freedom House, 2017). Ketika kata-kata dan gambar menjadi alat untuk memobilisasi dan menarik perhatian orang, penting untuk mempertanyakan apakah mereka merefleksikan kenyataan secara tepat (Davies, 2018).

Media sosial menjadikan pengetahuan mengenai emosi sebagai alat bagi kontrol politik, dan ini menjadi ancaman karena dapat memengaruhi psikologi massa secara strategis dengan melakukan propaganda. Pelaku kampanye politik modern memahami bahwa sentimen dan opini publik paling baik dipengaruhi melalui intervensi skala kecil yang terlihat marjinal alih-alih pengumuman besar yang formal. Media sosial dan bahasa sebagai perangkat yang digunakan sehari-hari dipergunakan sebagai “senjata” dalam politik. Kuncinya adalah melihat hal ini dari aspek yang berbeda, bukan dalam hal fungsi, namun dalam segala kemungkinan dampak yang dapat dihasilkannya. Media sosial digunakan sebagai senjata semata-mata karena itu dapat dilakukan (Davies, 2018).

Literasi Kritis

Memahami literasi politik perlu berangkat dari relasi antara bahasa dan kekuasaan yang membangun hegemoni. Gramsci menjelaskan literasi sebagai konsep dan praktik sosial yang terkait secara historis dengan pengetahuan dan kekuasaan (Freire dan Macedo, 1987). Pengertian hegemoni dalam perspektif Gramscian memiliki dua asumsi dasar yang membedakannya dengan bentuk hegemoni tradisional yang menekankan pada struktur. Pertama, terdapat perluasan makna politik, yang awalnya merujuk pada aktivitas pemerintah dan praktik kekuasaan negara ke bagaimana seseorang mempersepsikan dunia. Kedua, hegemoni dalam pandangan Gramsci terdiri dari analisis institusional dan sosial dari berbagai kelas dan organisasi yang ada di masyarakat, antara lain negara, masyarakat sipil, dan berbagai institusi lainnya seperti sekolah, gereja, koran, penerbit buku dan perusahaan media. Gramsci menyoroti relasi dasar dalam teori demokrasi, yaitu keterkaitan antara koersi dan persetujuan (*coercion and consent*). Koersi tidak selalu berlangsung dalam aksi-aksi yang mengandung kekerasan dan persetujuan tidak selalu diberikan dalam kondisi di bawah tekanan, tetapi kelompok hegemon dapat menggunakan cara sedemikian rupa untuk mendapatkan persetujuan dari kelompok yang ditindas, tanpa kelompok tersebut menyadari bahwa mereka ada dalam relasi kuasa hegemoni (Ives, 2004).

Konteks hegemoni ini dengan sendirinya menjadikan bahasa sebagai aspek krusial dari bagaimana seseorang memahami dan memaknai dunia. Perhatian Gramsci terhadap bahasa menjelaskan bagaimana

kekuasaan beroperasi dalam aspek molekuler kehidupan sehari-hari (Ives, 2004). Bahasa terkoneksi dengan bagaimana masyarakat mencoba memahami dunia. Karenanya, literasi berkaitan dengan reproduksi konstruksi sosial yang melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok tertentu (Freire dan Macedo, 1987). Hal ini ditegaskan oleh Davies (2018), yang menjelaskan bahwa berkembangnya politik sebagai perang menjadikan kata-kata sebagai senjata. Kata-kata menjadi instrumen kekerasan yang mencari dan mengeksploitasi kelemahan manusia.

Menurut Gramsci, bahasa dapat melanggengkan hegemoni ataupun melawan hegemoni (counter-hegemony). Sebagai basis kekuasaan, bahasa, utamanya literasi, haruslah berakar dari semangat kritik. Literasi dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mengalami tindak represi dan dominasi dalam relasi sosial dengan berperan sebagai kritik untuk membangun kontrahegemoni pendidikan yang berdasar pada proyek politik membangun masyarakat intelektual. Sebagai akibatnya, literasi dalam dunia modern dipahami sebagai usaha untuk melawan dominasi dan mengambil peran aktif untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar warga dapat bersuara dalam membentuk dan mengatur masyarakat (Freire & Macedo, 1987).

Proyek hegemoni kultur dan konsepsi mengenai relasi antara pengetahuan dan kekuasaan Gramsci menjadi dasar bagi perkembangan teori literasi kritis, yang sejalan dengan pandangan dasar perspektif kritis yang kembali mempertanyakan demokrasi yang egaliter dan kebebasan individu, terutama merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 dan kentalnya nilai-nilai Barat dalam kultur media (Kincheloe dan McLaren, 2000). Dalam *Literacy: Reading The Word and The World* (1987), Freire menekankan pentingnya peran pendidikan dan literasi sebagai salah satu unsurnya untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni. Freire memandang literasi sebagai hubungan dialektis antara manusia dengan dunianya, dan menekankan pada aktivitas membaca teks (*reading the word*) sebagai bagian penting dari membaca dan memahami konstruksi sosial-politik yang berlangsung dalam masyarakat (*reading the world*).

McDaniel (2004) menjelaskan bahwa literasi kritis melampaui kebiasaan membaca dan menulis yang konvensional dan mencakup berpikir kritis, bertanya, dan transformasi diri atau dunia seseorang. Dalam literasi kritis “teks” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat “dibaca” dan tidak terbatas hanya pada kata-kata. Sebuah kaos, graffiti, kotak sereal, atau batu dapat “dibaca” sebagai teks. Pada dasarnya, seseorang dapat “membaca”, menginterpretasi, mempertanyakan, dan “menulis kembali” segala aspek dari kehidupannya. Salah satu unsur yang tidak biasa dari literasi kritis adalah aksi sosial yang tumbuh dari kesadaran pembaca. Literasi harus dilihat sebagai aksi politis dan harus dapat menyediakan refleksi kritis bagi pembaca dalam memahami konteks konkrit di negaranya (Freire & Macedo, 1987).

Tidak ada metode dalam literasi kritis yang berlaku universal (McLaughlin dan DeVogd, 2004). Meski tidak ada prinsip dan unsur-unsur literasi kritis yang disepakati seluruh ilmuwan, McDaniel (2004) mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar literasi kritis sebagai berikut:

1. Mengungkap makna implisit dari teks
2. Memeriksa diskursus, dan
3. Aksi sosial.

Vasquez (2010) menambahkan bahwa literasi kritis dibangun atas pemahaman budaya siswa dan berpendapat bahwa terdapat pemahaman fundamental bahwa teks tidaklah netral. Secara mendasar, siswa yang membaca dengan perspektif literasi kritis akan memiliki kemampuan untuk (Demoiny & Ferraras-Stone, 2018):

1. Mempertanyakan intensi dan pesan tersirat penulis dalam teks tersebut,
2. Menganalisa isu kekuasaan yang dicontohkan dalam teks, dan
3. Berkontribusi dalam aksi sosial untuk kesetaraan dan keadilan.

Freire menempatkan literasi sebagai proyek politik emansipatoris, yang memampukan warga untuk melakukan rekonstruksi terhadap relasinya di dalam masyarakat (Freire dan Macedo, 1987). Literasi berperan fundamental dalam memberdayakan warga untuk bersuara, karena eksistensi warga sejatinya merupakan bagian dari konstruksi historis yang di dalamnya terdapat relasi kuasa yang spesifik. McLaughlin & DeVogd (2004) menyusun kerangka dasar dalam menganalisis berbagai teks melalui perspektif literasi kritis, yang meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Sudut pandang siapa yang diekspresikan?
2. Apa yang diinginkan penulis untuk pembaca pikirkan?
3. Suara siapa yang hilang, disenyapkan, atau diabaikan?
4. Bagaimana perspektif alternatif direpresentasikan?
5. Bagaimana ini berkontribusi terhadap pemahaman pembaca dari perspektif kritis?
6. Apa aksi yang dapat dilakukan pembaca berdasarkan apa yang sudah dipelajari?

Literasi berperan sebagai narasi bagi agen dalam melakukan upaya untuk menolak diskursus dominan dan konvensional dengan membangun dan menyediakan pembaca berbagai pengalaman dan relasi yang ada di antara pembaca dan realitas sekitarnya (Freire & Macedo, 1987). Literasi kritis dan imajinasi kritis akan membantu seseorang berperan sebagai aktor sosial yang aktif alih-alih konsumen yang pasif (Mayo, 2015). Literasi dapat digunakan sebagai alat untuk menilai bagaimana pengetahuan, kekuasaan, dan praktik sosial dikonstruksi secara kolektif dalam rangka proses pembuatan keputusan dalam masyarakat demokrasi. Sebagai lawan dari dominasi hegemoni dan manipulasi, tujuan dari literasi kritis adalah partisipasi warga sebagai subjek dalam demokrasi (Freire & Macedo, 1987).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif kritis yang menekankan riset sebagai bentuk kritik sosial dan budaya, dan menempatkan segala pemikiran sebagai sesuatu yang diwadahi oleh relasi kuasa dan didasarkan pada konstruksi sosial (Kincheloe & McLaren, 2000). Metode yang digunakan adalah content analysis, yang meliputi pembacaan sistematis atas teks, gambar, atau materi simbolik lainnya (Krippendorff, 2018), spesifiknya interpretive content analysis yang memungkinkan eksplorasi alur cerita, subjek dan objek dalam teks, posisi normatif, serta cara yang digunakan untuk mengklaim posisi ini. Tahapan penelitian melibatkan koding yang dilakukan secara induktif dan direiterasi (Drisko dan Maschi, 2016). Analisis tidak dilakukan berdasarkan ukuran kuantitatif, karena indikator kuantitatif tidak dapat serta merta diterjemahkan sebagai intensitas makna, dampak sosial, dan kesukaan (Newbold et al. 2002 dalam Macnamara, 2005). Data yang dikumpulkan dikaitkan dengan berbagai literatur sehingga dapat dilakukan interpretasi dan evaluasi terhadap narasi yang dibawakan novel tersebut, utamanya sebagai narasi melawan propaganda terkomputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konten novel “Bungkam Suara” dilakukan dengan membaca dan melakukan koding induktif terhadap teks tersebut. Koding dilakukan dengan mendata isu yang dibahas dan sikap penulis terhadap masing-masing isu, yang dilanjutkan dengan tabulasi. Hasil tabulasi menunjukkan adanya sejumlah isu yang dibahas dalam novel “Bungkam Suara” yang dapat dikategorikan ke dalam lima klaster isu, yaitu klaster Demokrasi, Media Sosial dan Post-Truth, Negara dan Kekuasaan, Kesenjangan, dan Literasi Kritis. Klasterisasi dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kategori dari isu yang dibahas dan pembahasan beberapa isu secara bersamaan dalam satu bab.

Novel “Bungkam Suara” membahas isu Negara dan Kekuasaan melalui surveillance yang dilakukan pemerintah NKAL. Surveillance dapat dijelaskan sebagai upaya sistematis untuk mengumpulkan dan memproses data personal untuk melakukan pengelolaan terhadap individu atau kelompok tertentu yang bertujuan mendorong atau mencegah perilaku tertentu di dalam kelompok tersebut (Fuchs, 2011 dalam Fuchs, 2015). CCTV yang dipasang di banyak tempat di NKAL menggambarkan penggunaan perangkat pengawasan dan tersebar luasnya ketersediaan sensor untuk mengawasi hampir setiap detil perilaku manusia (Filgueiras dan Almeida, 2020) untuk membuat seseorang menghindari melakukan hal-hal yang dianggap salah dan memalukan, dan implikasi terbesarnya adalah kekuasaan (Susskind, 2018).

Surveillance di NKAL tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital berupa CCTV, namun juga dilakukan di media sosial dengan melabel masing-masing akun warganya dengan avatar berwarna merah, hitam, atau kuning untuk menentukan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang dianggap mencurigakan. Keterhubungan warga dengan ponsel dan media sosial membuat pemerintah di berbagai belahan dunia berusaha keras mengawasi media sosial dan membatasi warganya untuk

menyampaikan pendapat dan membangun gerakan melalui ponsel mereka (Susskind, 2018; Aschoff, 2020). Selain itu, NKAL juga membuat propaganda bahwa tidak ada negara lain di luar NKAL untuk melangsungkan kediktatoran. Bagian ini serupa dengan studi Hindman dan Morozov (2011) yang mencontohkan Cina dan Belarus sebagai negara yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana kontrol. Ini dapat dilakukan karena internet, regulator, dan operator besar di baliknya didominasi oleh kekuatan ekonomi politik dan relasi kuasa yang berasal darinya (Dahlgren, 2015). Surveillance yang dilakukan negara adalah tindakan yang melanggar privasi warga, yaitu hak untuk ditinggalkan sendiri atau hak menentukan bagian apa saja dari diri kita yang aksesibel bagi pihak lain (Fuchs, 2015). Terdapat perbedaan antara narasi novel “Bungkam Suara” dengan berbagai literatur mengenai surveillance. Dalam bab 8 novel tersebut, diceritakan surveillance dilakukan oleh Tentara Kerajaan di bawah komando raja langsung, sedangkan berbagai literatur yang ada banyak menunjukkan polisi sebagai aktor surveillance dengan berbagai contoh kasus.

Selain surveillance, novel ini juga membahas isu Kesenjangan dengan membahas isu kemiskinan struktural yang dihubungkan penulis dengan tumpulnya daya kritis warga terhadap penguasa karena sibuk mencari makan. Susskind (2018) menjelaskan bahwa orang-orang biasa telah dikondisikan secara psikologis untuk menerima nasib mereka secara pasif. Mereka terkurung dalam ilusi yang membuat perubahan terlihat mustahil, bahkan tidak diperlukan. Filgueiras dan Almeida (2020) menjelaskan bahwa dunia digital tidak tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Schradie (2015) menjelaskan bahwa kesenjangan kelas memperparah proses kehilangan hak-hak sipil bagi mereka dari kelas bawah karena ketimpangan digital, karena adanya batas-batas ongkos kapital, tenaga, waktu, pendidikan, informasi, motivasi dan batasan lainnya yang menghalangi partisipasi politik secara daring bagi kelas miskin dan kelas pekerja.

Isu kemiskinan struktural yang dibahas dikaitkan dengan isu surveillance, dengan menceritakan upaya warga Distrik Neang (distrik yang miskin) untuk melawan surveillance yang dilakukan Algojo Raja-Raja. Sesuai dengan konteks ini, Fuchs (2015) menjelaskan bahwa meski polisi atau alat negara lainnya memiliki teknologi surveillance yang kuat, tetapi di sisi lain warga juga menggunakan teknologi yang lebih sederhana dengan jangkauan yang lebih kecil (kamera ponsel, video langsung, dsb.) untuk menguak kekerasan yang dilakukan aparat negara, atau dikenal dengan istilah participatory surveillance. Meski demikian, ada asimetri karena perangkat negara memiliki lebih banyak sumber daya, kapasitas, kemungkinan akses dan waktu untuk melakukan surveillance. Jack Goldsmith dan Tim Wu (2006) menjelaskan bahwa internet tidak menutupi fakta bahwa negara tetap memiliki monopoli untuk memaksakan tatanan sosial secara efektif. Kekuatan negara atas warganya dalam dunia internet adalah nyata (Moss, 2015). Propaganda, baik dalam bentuk tradisional maupun propaganda terkomputasi dijalankan oleh negara untuk melangsungkan kediktatoran.

Penggunaan internet sebagai sarana hegemoni disebut oleh Palfrey (2010), di mana negara dan berbagai pihak lainnya melihat aktivitas dan ekspresi di internet sebagai hal yang perlu diatur sedemikian rupa. Di negara otoriter pembatasan dilakukan karena alasan politik untuk menekan oposisi (Moss, 2015).

Novel ini menceritakan bagaimana Pihak Kerajaan sebagai hegemon menggunakan propaganda terkomputasi untuk melakukan pembatasan di ruang digital dan membuat narasi yang menjatuhkan oposisi. Penguasaan dunia digital oleh segelintir otoritas tertentu beresiko mendorong rezim politik yang otoritarian (Howard, 2011; Bannister dan Connolly, 2018; Van Dijk, 2012 dalam Filgueiras dan Almeida, 2020). Propaganda terkomputasi yang dilakukan oleh otoritas politik menunjukkan bahwa institusi politik saat ini menghadapi kesulitan dalam meraih perhatian publik, menciptakan otoritas dan pesan-pesan yang dapat dipercaya, serta bersaing dengan agenda-setting yang bersifat akar rumput (Coleman dan Freelon, 2015; Moss, 2015).

Pada bab 11-12 misalnya, penulis banyak menjelaskan bagaimana disinformasi digunakan oleh Raja NKAL untuk melanggengkan hegemoni dan menjatuhkan lawan politiknya. Selain itu, hegemoni raja juga digambarkan dalam wacana penghapusan Hari Bebas Bicara. Susskind (2018) menjelaskan kaitan antara teknologi dengan hegemoni dengan menyatakan bahwa cara terakhir untuk mengontrol masyarakat adalah mengontrol apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang akan mereka katakan dengan melakukan penyaringan (filtering). Terdapat kekuasaan dalam kemampuan untuk menjaga isu-isu tertentu lepas dari panggung politik. Filgueiras dan Almeida (2020) menambahkan bahwa modal yang paling penting dalam dunia digital adalah informasi. Di sini, penulis memberikan kritik keras terhadap propaganda terkomputasi dan menaruh optimisme terhadap demokrasi, yang diwakili salah satu pernyataan tokoh yang menginginkan Hari Bebas Bicara setiap hari agar ke terjadi check and balance. Optimisme ini muncul karena demokrasi dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah korupsi dan tirani.

Selain kritik terhadap propaganda terkomputasi dan disinformasi, penulis juga melakukan kritik terhadap surveillance dengan menggambarkan dampak negatif dari surveillance yang dilakukan negara. Seperti yang dijelaskan oleh Susskind (2018) bahwa masyarakat ada di bawah kendali pihak yang mengontrol platform dan berkomunikasi atas izin mereka serta mengikuti ketentuan mereka. Teknologi akan memudahkan otoritas politik untuk memaksakan aturan, dan menjadi ancaman bagi kebebasan yang akan dijalankan oleh rezim otoriter. Secara umum, isu Negara dan Kekuasaan dibahas dalam narasi otoritarianisme dengan menggambarkan NKAL sebagai negara diktator. Penulis menggambarkan bagaimana kecanggihan teknologi yang berkembang di NKAL tidak serta merta menjadikan NKAL sebagai negara demokratis, justru sebaliknya. Ini sejalan dengan yang dijelaskan Davies (2018), bahwa kontras dengan optimisme terhadap internet sebagai perpanjangan tangan demokrasi, internet justru paling efektif digunakan sebagai alat memata-matai, pengenalan pola dan kontrol. Menyambungkan dengan isu kemiskinan struktural dan oligarki, penulis menggambarkan

besarnya kekuasaan yang dipegang oleh negara dengan perangkat teknologi yang berkembang pesat. Di sini, penulis mengkritik kediktatoran dan berbagai bentuk upaya mata-mata dan mendukung narasi kebebasan berpendapat yang dianggap lebih demokratis. Sedangkan isu propaganda terkomputasi dalam novel ini dibahas dengan memposisikan post-truth dan kehadiran media sosial sebagai antitesis terhadap demokrasi. Media Sosial dan Post-Truth banyak diangkat dengan memberikan beberapa ilustrasi kasus. Pertama, pertengkaran seorang warga dengan artis yang diliput oleh wartawan dengan framing yang berbeda-beda dan disebar di media sosial. Kedua, spill di media sosial oleh akun anonim, yang membahas echo chamber dan anonimitas sebagai isu turunan propaganda terkomputasi. Ketiga, pertengkaran antarpengguna media sosial dalam unggahan mengenai seseorang yang sedang minum jus mangga.

Ilustrasi yang diberikan penulis dalam bagian ini menunjukkan bahwa media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Twitter telah menjadi bagian dari komunikasi politik (Dahlgren, 2015). Aschoff (2020) menjelaskan bahwa kombinasi ponsel dan media sosial menjadi pusat perubahan lanskap politik yang membuat politik menjadi personal. Media sosial dan agregator berita online telah menjadi sumber utama berita. Bagi anak muda, terdapat imbalan sosial dalam mengungkapkan pendapat melalui media sosial (Susskind, 2018) dan luasnya keberadaan media digital dapat menangkap tingkah dan kelemahan figur publik di ruang privat, menyediakan bahan bagi whistle-blowers dan penggosip serta menjadikan skandal sebagai fitur konstan dari kehidupan publik (Davies, 2018).

Namun, pada bagian ini juga diilustrasikan secara tersirat bagaimana warga kebanyakan hanya menjadi konsumen dari konten di media sosial, yang oleh Schradie (2015) dijelaskan sebagai akibat dari ketimpangan kelas. Melalui ilustrasi-ilustrasi ini, penulis menggambarkan cara kerja propaganda terkomputasi. Dahlgren (2015) menegaskan bahwa internet bukan hanya perangkat teknologi, tetapi juga institusi sosial terorganisasi dengan relasi kuasa, yang membentuk bukan hanya cara berpikir, tetapi juga informasi apa yang tersedia dan bagaimana penggunaanya mengorganisasi, menyimpan dan menggunakannya. Politik adalah relasi dinamis tempat orang dan institusi dari berbagai posisi menciptakan, mereproduksi, mendorong, dan mengubah aturan, struktur, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Aschoff, 2020).

Pembahasan isu Media Sosial dan Post-Truth juga dikaitkan penulis dengan isu Negara dan Kekuasaan. Penulis menjelaskan polarisasi sebagai alat mempertahankan hegemoni penguasa, sejalan dengan studi dari Coleman dan Freelon (2015) yang menunjukkan bahwa elite politik menggunakan politik digital sebagai sarana memangkas kritisisme dan menarik perhatian publik. Meskipun platform media sosial diakses publik secara luas, tetap terjadi kelas-kelas dalam praktik publik di ruang digital (Schradie, 2015). Media sosial dan platform berita digital memungkinkan seseorang untuk menjadi produser dan kritikus konten maupun konsumen (Susskind, 2018). Selain itu, penulis juga menjelaskan bagaimana kemajuan media digital dimanfaatkan untuk melangsungkan kediktatoran di NKAL. Surveillance bukan

fenomena khas media digital, tetapi meningkatnya peran komputer dalam masyarakat telah membawa kekhawatiran publik mengenai fenomena tersebut (Fuchs, 2015; Aschoff, 2020) karena skala peningkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya (Susskind, 2018; Moss, 2015). Terdapat kaitan yang kuat antara informasi dan kontrol (Susskind, 2018).

Propaganda terkomputasi, disinformasi, buzzer, dan polarisasi dijelaskan penulis melalui ilustrasi pabrik propaganda dengan tim propaganda bawah tanah. Ilustrasi pabrik propaganda yang dipimpin oleh Prof. Terang dengan klien Pemangku Adat menjelaskan bagaimana elite-elite politik memanfaatkan big data dalam memetakan warga, membuat model perilaku politik mereka, memprediksi intensi mereka, dan menargetkan iklan dan sumber daya organisasi berdasarkan hasil pemetaan tersebut (Susskind, 2018). Masyarakat semakin sering melihat kemunculan tokoh-tokoh politik yang menggunakan media sosial untuk terhubung dan memengaruhi konstituen mereka (Aschoff, 2020). Davies (2018) menjelaskan bagaimana media sosial justru membuat demokrasi dikooptasi oleh elite, dengan menggunakan media sosial sebagai senjata untuk memainkan perasaan warga dan mempengaruhi psikologi massa melalui propaganda.

Susskind (2018) menyatakan bahwa semakin banyak tindakan, ucapan, pergerakan, relasi, emosi, dan kepercayaan masyarakat akan meninggalkan jejak digital, dan semua data ini digunakan untuk memprediksi dan mengontrol perilaku warga. Filgueiras dan Almeida (2020) memperingatkan bahwa penggunaan data dalam situs yang berlebihan atau tidak tepat dapat merugikan masyarakat, seperti munculnya serangan siber, disinformasi, dan kesulitan bagi masyarakat dalam memecahkan masalah. Teknologi memengaruhi manusia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai warga. Propaganda terkomputasi melakukan kontrol persepsi. Mereka akan menentukan apa yang seseorang ketahui, rasakan, inginkan, dan lakukan. Kelompok yang memiliki dan menguasai sistem ini akan memiliki kekuasaan untuk membentuk preferensi politik masyarakat (Susskind, 2018). Pabrik propaganda yang dimiliki oleh Prof. Terang dan bekerja untuk pihak Pemangku Adat adalah ilustrasi yang tepat dari pernyataan Gillespie (2018, dalam Filgueiras dan Almeida, 2020) bahwa sektor privat telah menguasai infrastruktur internet dan kerap berperan sebagai produser konten untuk data dan informasi bagi individu dan pemerintah. Karakter Prof. Terang sebagai pemimpin tim propaganda menjadi simbol dari orang berpendidikan tinggi dan kelas ekonomi atas, sejalan dengan pernyataan Van Laer (2010: 356) dalam Schradie (2015) bahwa internet pada dasarnya digunakan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berprofesi tetap yang memiliki ketertarikan besar dalam politik dan banyak pengalaman dalam demonstrasi.

Di sini dijelaskan bagaimana propaganda terkomputasi dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, dalam hal ini kepentingan Pemangku Adat di Hari Bebas Bicara. Ilustrasi ini sejalan dengan studi yang dilakukan Aschoff (2020) yang menyatakan bahwa partai politik merekrut perusahaan teknologi netral untuk membangun kampanye media sosial mereka. Dalam hal ini, dunia digital dilihat sebagai penyedia

produk dan jasa yang dikendalikan segelintir konglomerat teknologi (Filgueiras dan Almeida, 2020). Moss (2015) menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan asimetri dan ketimpangan kuasa di dunia maya. Struktur dan relasi kuasa dapat memanfaatkan data tersebut secara merugikan bagi individu (Fuchs, 2015). Meskipun menyinggung para elite dan mengilustrasikan pabrik propaganda yang canggih, novel “Bungkam Suara” kurang menekankan kontras tersebut, yaitu ketimpangan yang terjadi di ruang digital.

Propaganda terkomputasi di NKAL dilakukan oleh dua pihak yang mewakili dualisme kepemimpinan yang terjadi di NKAL, yaitu pihak Kerajaan dan pihak Pemangku Adat. Aschoff (2020) menyatakan bahwa media sosial dapat digunakan untuk membangun citra positif elite politik, yang dalam novel ini adalah Pemangku Adat. Melalui media sosial, para politisi menghujani warganya dengan kabar terbaru mengenai kegiatan politik maupun kehidupan pribadi mereka. Sebagai dampak dari propaganda terkomputasi, penulis juga membahas polarisasi yang diilustrasikan adanya kelompok penggaung pro, kontra, dan netral untuk isu propaganda yang dilempar ke media sosial. Media sosial mendiseminasi ujaran kebencian, meningkatkan polarisasi dalam masyarakat dengan mendorong perilaku tertentu dan menyebarkan perspektif politik yang saling bertentangan (Sunstein, 2018 dalam Filgueiras dan Almeida, 2020). Pada bagian ini, penulis membahas bagaimana propaganda terkomputasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik elite dan mendukung anonimitas sebagai bentuk keleluasaan warga dalam mengkritik. Susskind (2018) menyatakan ketika ruang debat didominasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk menyaring konten, atau mengerahkan pasukan bot yang lebih ganas, diskursus akan condong pada mereka yang memiliki teknologi yang lebih baik dan bukan mereka yang benar-benar memiliki ide yang lebih baik. Selain propaganda terkomputasi dan polarisasi, penulis juga secara mendalam membahas bagaimana cara narasi propaganda dan disinformasi dibangun, seperti narasi nasionalisme dalam bermain gim, narasi untuk menaikkan nama tokoh tertentu, dan penggunaan buzzer.

Menariknya, di bagian ini penulis menyatakan skeptisisme akan demokrasi. Demokrasi digambarkan sebagai dalih untuk menutupi kepentingan politik pihak tertentu yang ingin merebut kekuasaan. Teknologi dianggap mengancam demokrasi karena dampak sosial dan politik yang korosif dari disinformasi (Bowers dan Zittrain, 2020 dalam Filgueiras dan Almeida, 2020). Penulis juga membahas keterkaitan antara disinformasi, echo chamber, dan polarisasi serta penggunaannya untuk memanipulasi opini publik. Echo chamber dalam bagian ini dimulai dengan melakukan geo-fencing, yaitu mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan berbagai aspek, seperti perilaku, agama, pilihan politik, tingkat pendidikan, hingga kemampuan ekonomi. Klasifikasi inilah yang dijadikan dasar dalam memberikan narasi propaganda, sehingga kelompok masyarakat yang berbeda akan mendapatkan narasi propaganda yang berbeda. Dalam studinya, Carlos (2018, dalam Filgueiras dan Almeida, 2020) mencontohkan kampanye politik yang menargetkan pengguna Facebook melalui iklan yang didasarkan pada faktor-faktor seperti gender, lokasi, atau loyalitas politik. Periklanan dengan bentuk micro-targeted ini sangat efektif dalam memengaruhi pemilih untuk mendukung kandidat tertentu. Echo chamber pada

gilirannya akan memperkuat bias individu (Dahlgren, 2015). Batas antara teknologi yang memengaruhi dan teknologi yang memanipulasi adalah kabur (Susskind, 2018).

Cass R. Sunstein (2017) mengkhawatirkan polarisasi ini dan dampaknya terhadap politik. “Media sosial memudahkan orang untuk mengelilingi diri mereka dengan opini dari orang-orang yang berpikiran sama dan memisahkan diri mereka dari pandangan yang berbeda. Ini berbahaya bagi demokrasi dan kedamaian sosial” (Aschoff, 2020). Ketika seseorang hanya melihat dan mengalami potongan kecil dari dunia, bagian mana yang ditunjukkan kepadanya akan memiliki pengaruh besar. Perbedaan ini menyebabkan fragmentasi sosial yang mengarah pada polarisasi. Di dunia digital, pihak lawan bukan hanya mengklaim opini mereka sendiri, tetapi juga fakta mereka sendiri (Susskind, 2018). Disinformasi menguntungkan media sosial, dengan menciptakan batasan bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan (Filgueiras dan Almeida, 2020)

Selain mengkritik polarisasi, penulis juga mengkritik sikap fanatik warga yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk memecah belah, misalnya bahaya dari suara populis yang bisa merusak. Dengan semakin maraknya persona di internet dan obsesi terhadap “likes” dan pengikut, banyak yang menunjukkan diri mereka sebagai yang paling benar dan terlibat dalam perdebatan-perdebatan besar yang tidak bermakna. Para politisi berusaha untuk disukai sebanyak mungkin orang dengan mengeluarkan ide-ide populis di media sosial (Aschoff, 2020). Susskind (2018) juga menyatakan bahwa pilihan untuk memprioritaskan berita atau hasil pencarian berdasarkan klik dan popularitas meminggirkan perspektif yang lebih jarang didengar sehingga mendorong sensasionalisme. Terakhir, penulis menyoroti masyarakat kelas bawah sebagai kalangan yang lebih rentan terhadap propaganda terkomputasi. Pernyataan ini sejalan dengan Schradie (2015) yang menjelaskan adanya ketimpangan produksi digital antara kalangan elite dan non-elite. Kalangan yang berpendidikan tinggi punya lebih banyak kontrol terhadap kerja-kerja digital mereka, sedangkan orang miskin yang tidak memiliki waktu lebih tidak memproduksi konten sebanyak yang lain.

Pembahasan mengenai Demokrasi dalam novel ini sebagian besar dikaitkan dengan isu Media Sosial dan Post-Truth. Narasi yang disampaikan terhadap Demokrasi di satu sisi menggambarkan optimisme dengan menaruh harapan pada kebebasan berpendapat melalui Hari Bebas Bicara, namun di sisi lain menggambarkan pesimisme terhadap demokrasi yang dikooptasi oleh elite. Isu demokrasi dibahas secara spesifik dengan menceritakan kediktatoran dan hegemoni melalui upaya raja untuk mengembalikan NKAL ke sistem pemimpin tunggal. Posisi Pemangku Adat dalam bagian ini dinyatakan penting agar terjadi keseimbangan politik. Namun, penulis juga skeptis terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat yang menurutnya dapat menyebabkan disinformasi dan polarisasi. Disinformasi dilakukan dengan membuat isu-isu sepele yang berdampak besar: memanipulasi pengetahuan dan opini publik. (Susskind, 2018). Kemunculan internet memang memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pertukaran informasi politik, namun tidak terjadi peningkatan kualitas

diskursus politik di ruang publik. Politik tetap terasa memecah belah dan miskin informasi karena adanya kontrol persepsi, fragmentasi realitas, anonimitas, dan bot (Susskind, 2018).

Media sosial telah mendorong terbelahnya demokrasi dan polarisasi politik (Sunstein 2018 dalam Filgueiras dan Almeida, 2020). Propaganda terkomputasi yang digambarkan penulis tidak hanya dilakukan oleh elite. Penulis juga menggambarkan bagaimana kelompok miskin dengan sumber daya yang lebih terbatas memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperjuangkan agenda politik. Penggambaran protes yang dilakukan para preman pasar terhadap negara menjadi simbol kritik warga terhadap elite. Aschoff (2020) menjelaskan adanya benang merah dari berbagai kerusuhan politik dalam satu dekade terakhir, yaitu kritik terhadap sistem yang memungkinkan para elite untuk memiliki kekayaan dan kekuasaan berlimpah, sedangkan warga biasa kesulitan untuk mencapai kehidupan yang aman, bermartabat, dan memuaskan. Media sosial dan platform jaringan telah menyediakan akses bagi orang biasa agar suara mereka didengar (Susskind, 2018).

Aschoff (2020) menambahkan bahwa gerakan digital memitigasi batasan tradisional dalam mengorganisir gerakan, seperti usia dan sumber daya. Jika kekuatan dikerahkan melalui teknologi digital, perlawanan juga akan mengambil bentuk digital. Media digital memungkinkan pesan-pesan yang disampaikan untuk ditantang, direformulasi, atau dikacaukan audiens (Coleman dan Freelon, 2015). Terjadi sentimen massa yang diproduksi oleh ribuan *tweet* dan unggahan yang dibuat dan dibagikan individu, yang menumbuhkan perasaan bahwa setiap orang dapat menjadi bagian dari sebuah gerakan dan bahwa hal-hal yang terjadi di sekitar adalah bagian dari gerakan ini (Aschoff, 2020).

Ancaman terhadap demokrasi juga dijelaskan melalui penggambaran isu disinformasi dengan mengulas satu isu baru, yaitu penggunaan *deepfake* dalam propaganda terkomputasi. Ini dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi, karena demokrasi dilandaskan pada kejujuran dan disinformasi. Padatnya sirkulasi dalam ruang publik daring menjadi distraksi yang mendorong kompetisi ketat untuk mendapatkan perhatian massa. Carr (2010 dalam Dahlgren, 2015) menjelaskan bahwa internet berdampak merugikan pada fungsi kognitif penggunaannya. Media sosial berkontribusi pada menurunnya rasionalitas di ruang publik. Emosi yang berkembang di ruang publik bergerak secara kontraproduktif terhadap demokrasi, misalnya dengan berkembangnya narasi populis (Dahlgren, 2015).

Namun, media sosial sebagai senjata dan sarana kritik juga digambarkan dalam bentuk narasi propaganda yang dilancarkan untuk melakukan kritik terhadap korupsi besar-besaran yang dilakukan kerajaan. Coleman dan Freelon (2015) menyatakan bahwa ruang digital dapat menjadi tempat bagi penyebaran berita, diskursus, dan teknologi *surveillance* yang membuat tindak-tanduk elite lebih mudah terlihat. Berkembangnya internet sebagai ruang diskursus mengaburkan batas antara politik dan perbincangan sehari-hari. Seseorang dapat mengakses informasi politik dari banyak sumber dan tidak lagi menaruh perhatian utama pada narasi politik konvensional (Coleman dan Freelon, 2015).

Demokrasi menjadi keruh karena setiap pihak dapat menjadi pelaku propaganda, sehingga tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Harapan terhadap demokrasi digambarkan dengan adanya harapan akan pembagian kekuasaan dan ada keseimbangan antara negara dan rakyat. Penulis menggambarkan optimisme terhadap demokrasi yang digambarkan dengan runtuhnya kediktatoran raja. Runtuhnya kediktatoran raja dalam novel ini terkait dengan kekuatan warga dalam media sosial, yang juga terjadi di dunia nyata, seperti Arab Spring dan protes di negara-negara Afrika dalam satu dekade terakhir (Aschoff, 2020).

Filgueiras dan Almeida (2020) menjelaskan bahwa internet telah menjadi ruang yang dinamis, dan ini dapat mengancam demokrasi yang menuntut kestabilan institusional. Informasi yang dibawa oleh perasaan dapat berkonflik dengan fakta yang mapan. Kesegeraan sebagai kualitas krusial dari perasaan adalah hal yang membuatnya berpotensi menyesatkan, memunculkan ketakutan dan reaksi yang berlebihan (Davies, 2018). Internet telah menjadi tempat bagi masyarakat sipil, namun praktik para warganya sangat bervariasi (Dahlgren, 2015). Relasi yang erat antara elite politik dengan media diinterupsi secara radikal oleh artikulasi akar rumput mengenai kepentingan publik dan nilai-nilai yang dulunya tidak menembus agenda media massa, tetapi sekarang menguat dan bersirkulasi dalam berbagai ruang digital (Coleman dan Freelon, 2015).

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa novel “Bungkam Suara” relevan terhadap berbagai literatur yang ada, ditinjau dari isu yang diangkat, cara menyajikan isu ke dalam narasi fiksi, serta keterkaitan antar isu yang diilustrasikan dengan keterkaitan antarbagian cerita. Sebagai sarana literasi politik, novel “Bungkam Suara” memenuhi beberapa komponen, yaitu memberikan pengetahuan politik, spesifiknya mengenai propaganda terkomputasi, membantu pembaca untuk memahami pola kekuasaan, menanamkan nilai-nilai politik, seperti demokrasi, kebebasan berpendapat, dan keadilan, serta mendorong warga untuk melakukan aksi nyata merespon propaganda terkomputasi.

Sebagai sarana literasi kritis, novel ini menjadi upaya mengenalkan masyarakat kepada fenomena sosial politik. Media sosial dan propaganda terkomputasi diuraikan menurut dua asumsi dasar hegemoni. Media sosial membuat batas antara isu-isu politik dan konten lainnya serta batas antara politik dan kehidupan personal menjadi kabur. Propaganda terkomputasi memanipulasi opini publik dengan menyediakan informasi yang berperan besar pada bagaimana seseorang mempersepsikan dunia dan cara kerjanya. Batas-batas yang kabur tersebut memungkinkan kelompok hegemon, dalam hal ini negara untuk mendapat persetujuan dari warganya melalui manipulasi opini yang dilakukan dengan propaganda terkomputasi. Dalam *Pedagogy of the Oppressed*, Freire (2000) menyatakan bahwa orang-orang yang dieksploitasi tidak menyadari posisi mereka di bawah opresi.

Dari sini, disadari perlunya membaca dari sudut pandang yang kritis, kebutuhan untuk mempertanyakan alih-alih menerima secara pasif informasi yang ada (McLaughlin dan DeVogd, 2004). “Teks” yang

dimaksud dalam bagian ini dapat diartikan sebagai konten media sosial yang merupakan produk propaganda terkomputasi, yang menjelaskan warga yang menerima secara pasif informasi yang mereka dapatkan. Dalam hal ini, literasi dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang mengalami represi dan dominasi. Studi yang dilakukan oleh Demoiny dan Ferraras-Stone (2018) menjelaskan penggunaan buku cerita bergambar dengan narasi dominan dan counter-narrative yang dapat memperkaya pembelajaran ilmu sosial di sekolah. Studi tersebut menjadi gambaran bagaimana karya sastra dapat menjadi sarana literasi. Literasi melalui karya sastra tidak terbatas pada institusi pendidikan, tetapi juga dapat menjangkau warga dengan cakupan yang lebih luas. Dalam hal inilah novel “Bungkam Suara” berperan sebagai counter-narrative terhadap propaganda terkomputasi. Novel tersebut dapat menjadi sarana memberdayakan pembacanya untuk membangun kesadaran dalam melihat dunia yang ada dalam era Post-Truth.

Freire (1972) dalam Williams (2022) menjelaskan bahwa literasi kritis dapat membantu siswa dengan identitas marjinal untuk memahami posisi mereka dalam relasi kuasa yang diciptakan untuk mengambil aksi bermakna dalam rangka melawan penindasan dan ketidakadilan. Adams dan Bell (2016) juga menjelaskan bagaimana literasi kritis terkait dengan tujuan keadilan sosial, dengan membekali kelompok beridentitas dominan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bersekutu dan berjuang bagi keadilan. Sayangnya, literasi masih menempuh jalan terjal dalam tradisi literasi normatif yang tertanam dalam sistem pendidikan yang rasis dan bias kelas (Williams, 2022).

Novel “Bungkam Suara” berperan sebagai teks yang membantu pembacanya untuk mengkonstruksi fenomena propaganda terkomputasi yang terjadi di dunia nyata dengan menggunakan penggambaran-penggambaran propaganda terkomputasi yang disajikan dalam narasi karya sastra. Diharapkan, literasi melalui novel tersebut dapat menjadi fondasi agar warga dapat memahami posisinya serta memainkan perannya dalam masyarakat media sosial.

Literasi kritis dapat mengembangkan kemampuan pembaca menghubungkan antara teks dengan diri sendiri, teks dengan teks, dan teks dengan dunia. Dan ini mengarah pada bagaimana bagaimana mereka menerapkan apa yang mereka pelajari untuk membaca teks lainnya (McLaughlin dan DeVogd, 2004). Dalam konteks novel “Bungkam Suara”, pembaca dapat menghubungkan diri mereka dengan teks novel tersebut, dengan konten-konten yang mereka temui di media sosial, dan dengan propaganda terkomputasi secara luas. Setelah itu, pembaca dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapat ketika membaca “teks” lain, yaitu konten di media sosial. Novel ini berperan sebagai sarana refleksi kritis bagi pembacanya dalam memahami konteks propaganda terkomputasi yang berlangsung di Indonesia, dan bahayanya bagi keberlangsungan politik dan demokrasi. Pembaca juga diajak untuk memahami perannya di dalam masyarakat media sosial serta merekonstruksi posisinya di dalam propaganda terkomputasi, yang menjadikan literasi politik berdampak pada tindakan nyata pembaca.

Novel “Bungkam Suara” sebagai karya sastra bukanlah karya yang “netral” dan bebas nilai. Berkebalikan dengan literasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sejalan dengan hegemoni negara, novel “Bungkam Suara” sebagai sarana literasi politik mengambil posisi kritis terhadap kekuasaan dan terhadap propaganda terkomputasi.

Selama ini, literasi politik identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan sekolah. Literasi politik melalui ruang-ruang kelas adalah keharusan, namun membatasi literasi politik pada pendidikan formal yang dilangsungkan negara rentan membawa literasi politik menjadi kontraproduktif terhadap tujuan membangun kesadaran kritis warga negara. Ini karena kurikulum sekolah cenderung normatif (McLean et al., 2021 dalam Williams, 2022). Politisasi literasi di sekolah menjadikan upaya mengadopsi perspektif kritis beresiko, karena bertentangan dengan aspek institusional dari pendidikan (Williams, 2022). Pendidikan Kewarganegaraan sangat bias terhadap kepentingan politik penguasa sehingga dilaksanakan melalui pendekatan yang indoktrinatif (Mulyono, 2017; Widiatmaka, 2016; Salinas, Blevins, & Sullivan, 2012 dalam Demoiny dan Ferraras-Stone, 2018; Brown dan Au, 2014; Monforti dan McGlynn, 2010; Shear, 2015; Suh, An, dan Forest, 2014 dalam Demoiny dan Ferraras-Stone, 2018; Kohl, 1995 dan McGinley at al., 1997). Indoktrinasi tersebut diperparah dengan fakta bahwa cerita dapat membentuk cara mereka memahami diri mereka sendiri dan memahami dunia (McDaniel, 2004).

Karena itu, karya sastra relevan sebagai alternatif literasi politik. Berkebalikan dengan pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh negara, karya sastra diproduksi oleh masyarakat sipil sehingga mampu membangun literasi kritis terhadap sesama warga dan tidak rentan terhadap indoktrinasi. Sama seperti literasi kritis dalam pendidikan formal, karya sastra dapat membantu pembacanya untuk memahami maksud tersirat dari bacaan, memeriksa diskursus, dan mendorong pembaca dalam aksi sosial. Lebih jauh lagi, karya sastra sebagai sarana literasi politik dapat terus relevan sekalipun terjadi perubahan besar dalam lanskap politik, karena karya sastra adalah bentuk respons terhadap realitas dan pengarang tidak dapat lepas dari konteks kehidupan nyata (Sambodja, 2008).

KESIMPULAN

Karya sastra sejak masa lampau telah banyak menjadi sarana kritik sosial. Namun, belum banyak penelitian yang mengulas peran karya sastra sebagai sarana literasi politik dan bagaimana karya sastra dapat membangun pemikiran kritis. Oleh karena itu, penelitian ini membahas peran karya sastra sebagai sarana literasi politik dengan menggunakan contoh novel “Bungkam Suara” dengan isu propaganda terkomputasi. Dalam penelitian ini, novel “Bungkam Suara” dikaji dari dua aspek, yaitu perannya dalam melakukan literasi politik dan perannya sebagai narasi counter-hegemony terhadap propaganda terkomputasi. Sebagai sarana literasi politik, novel “Bungkam Suara” memberikan penggambaran propaganda terkomputasi melalui narasi, dialog, dan kutipan adegan yang membentuk satu kesatuan

cerita. Berbagai unsur yang ada dalam propaganda terkomputasi, seperti disinformasi, surveillance, echo chamber, dan polarisasi diilustrasikan dengan narasi yang saling berhubungan satu sama lain. Keterhubungan ini juga dapat dilihat dari bagaimana penulis menghubungkan antara propaganda terkomputasi dengan isu-isu lainnya seperti kebencian, kemiskinan struktural, dan demokrasi sehingga pembaca dapat melihat keterkaitan dan hubungan sebab-akibat antar isu dan mendapatkan gambaran besar mengenai isu-isu tersebut. Selain itu, novel ini juga mengambil posisi kritis terhadap propaganda terkomputasi dengan berperan sebagai counter-hegemony. Dalam novel ini, penulis banyak menyampaikan kritik terhadap propaganda terkomputasi dan isu-isu turunannya. Dari sisi pembaca, novel ini membantu pembaca untuk mengkonstruksi propaganda terkomputasi dan posisinya sebagai warga sehingga menjadi lebih kritis terhadap narasi-narasi yang berkembang di media sosial.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, karya sastra dapat menjadi alternatif dalam melakukan literasi politik. Karya sastra dapat menyederhanakan istilah-istilah keilmuan yang rumit dan menyajikannya dalam bentuk narasi yang menyenangkan dan mudah dipahami sehingga karya sastra dapat menjangkau banyak orang. Karya sastra sebagai bentuk literasi politik yang berasal dari sesama masyarakat sipil bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan, sehingga karya sastra dapat memberikan perspektif berbeda dan membangun daya kritis warga. Ke depannya, perubahan kondisi sosial-politik baik nasional maupun global akan menjadikan semakin banyak karya sastra relevan sebagai sarana literasi politik dan sebagai narasi alternatif terhadap isu-isu politik yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadi, F. (2017). *Partisipasi politik virtual: Demokrasi netizen di Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS.
- Aschoff, N. (2020). *The smartphone society: Technology, power, and resistance in the new gilded age*. Boston: Beacon Press.
- Biesta, G., & Lawy, R. (2006). From teaching citizenship to learning democracy: Overcoming individualism in research, policy, and practice. *Cambridge Journal of Education*, 36(1), 63–79. <https://doi.org/10.1080/03057640500490981>
- Blaiha, M. (2019). Politics and literature English literary work as a model. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 1–7.
- Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Psychological and Cognitive Sciences*, 114(28), 7313–7318.
- Coleman, S., & Freelon, D. (2015). Introduction: Conceptualizing digital politics. In *Handbook of digital politics* (pp. 1–16). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Dahlgreen, P. (2015). The internet as a civic space. In *Handbook of digital politics* (pp. 17–34). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Davies, I. (2008). Political literacy. In J. Arthur, I. Davies, & C. Hahn (Eds.), *SAGE handbook of education for citizenship and democracy* (pp. 377–387). London: SAGE Publications.
- Davies, W. (2018). *Nervous states: Democracy and the decline of reason*. London: Vintage.

- Demoiny, S. B., & Ferraras-Stone, J. (2018). Critical literacy in elementary social studies: Juxtaposing historical master and counter-narratives in picture books. *The Social Studies*, 109(2), 64–73. <https://doi.org/10.1080/00377996.2018.1451981>
- Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). *Content analysis: Pocket guide to social work research methods*. New York: Oxford University Press.
- Dudley, R. L., & Gitelson, A. R. (2003). Civic education, civic engagement, and youth civic development. *Political Science and Politics*, 36(2), 263–267.
- Eriksen, A. (2020). The political literacy of experts. *Ratio Juris*, 33(1), 82–97. <https://doi.org/10.1111/raju.12269>
- Farkas, J., & Schou, J. (2018). Fake news as a floating signifier: Hegemony, antagonism, and the politics of falsehood. *Javnost - The Public*, 25(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>
- Filgueiras, F., & Almeida, V. (2020). *Governance for the digital world: Neither more state nor more market*. New York: Springer International Publishing.
- Flint, C. (2006). A framework for understanding geopolitics. In *Introduction to geopolitics* (Ch. 1). Oxon: Routledge.
- Freedom House. (2017). *Freedom on the net 2017: Manipulating social media to undermine democracy*.
- Freire, P., & Macedo, D. (1987). *Literacy: Reading the word and the world*. London: Routledge.
- Freire, P. (2003). The process of political literacy. In P. Jarvis & C. Griffin (Eds.), *Adult and continuing education: Major themes in education* (pp. 279–286).
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. New York: The Continuum International Publishing Group Inc.
- Fuchs, C. (2018). Propaganda 2.0: Herman and Chomsky's propaganda model in the age of the internet, big data, and social media. In J. Pedro-Caranana, D. Broudy, & J. Klaehn (Eds.), *The propaganda model today: Filtering perception and awareness* (pp. 71–92). London: University of Westminster Press.
- Gitiyarko, V. (2023). Dilema pendidikan politik di Indonesia. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/15/dilema-pendidikan-politik-di-indonesia>
- Grasindo. (2023). Mencicip distopia lewat novel *Bungkam Suara*. Retrieved from <https://grasindo.id/blog/mencicip-distopia-lewat-novel-bungkam-suara>
- Harian Singgalang. (2019). JS Khairan releases *Kami (Bukan) Sarjana Kertas*. Retrieved from <https://hariansinggalang.co.id/js-khairan-release-kami-bukan-sarjana-kertas/>
- Hastuti, N. (2018). Novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian sosiologi sastra. *Humanika*, 25(1), 64–74.
- Heryanto, G. G. (2021). *Strategi literasi politik: Pendekatan teoretis dan praktis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hui, J. Y. (2020). Social media and the 2019 Indonesian elections: Hoax takes the center stage. *Southeast Asian Affairs*, 155–172.
- Howard, P. N., & Kollany, B. (2016). Bots, #strongerin, and #brexit: Computational propaganda during the UK-EU referendum. *Social Science Research Network*. Retrieved from <https://par.nsf.gov/biblio/10021337>
- Ives, P. (2004). *Language and hegemony in Gramsci*. London: Pluto Press.

- Jeffrey, L., Hegarty, B., Kelly, O., Penman, M., Coburn, D., & McDonald, J. (2011). Developing digital information literacy in higher education: Obstacles and supports. *Journal of Information Technology Education: Research*, 10(1), 383–413.
- Jumpa Online. (2023). Diskusi novel *Bungkam Suara* bersama JS Khairen. Retrieved from <http://www.jumpaonline.com/2023/01/14/23/04/19/5566/diskusi-novel-bungkam-suara-bersama-js-khairen/>
- Jurs, P. (2014). Forming components of civic competence. *Journal of Teaching and Education*, 03(03), 265–277.
- Khairen, J. S. (2019, March 9). *Cania 12 Semester Gak Lulus-Lulus! Apakah Ia Sarjana Kertas?* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/CrxNb5sUcUQ>
- Khairen, J. S. (2021). FB, Meta, dan PR besarnya dalam propaganda terkomputasi. Retrieved from <https://jskhairen.medium.com/rebranding-fb-jadi-meta-9206ff3e44e5>
- Khairen, J. S. (2024, March 13). [Instagram post]. Retrieved from <https://www.instagram.com/p/C4c7Rp8JFEs/?igsh=MTdoZ3JxZ3c3dm>
- Kincheloe, J. L., & McLaren, P. (2000). Rethinking critical theory and qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- King, K. (2019). Education, digital literacy, and democracy: The case of Britain's proposed 'exit' from the European Union (Brexit). *Asia Pacific Education Review*, 20, 285–294.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. California: SAGE Publications.
- Kroll, M. (1960). Politics in literature. *American Behavioral Scientist*, 3(5), 3–6. <https://doi.org/10.1177/000276426000300501>
- Kuehn, K. M., & Salter, L. A. (2020). Assessing digital threats to democracy and workable solutions: A review of the recent literature. *International Journal of Communication*, 14, 2589–2610.
- Kusman, A. P. (2017). Jalan baru pembumian Pancasila. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/09/13/jalan-baru-pembumian-pancasila>
- Lim, W. M. (2023). Fact or fake? The search for truth in an infodemic of disinformation, misinformation, and malinformation with deepfake and fake news. *Journal of Strategic Marketing*, 1–37.
- Lindberg, J. D. (1968). Literature and politics. *The Bulletin of the Rocky Mountain Modern Language Association*, 22(4), 163–167.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2022). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*.
- Macnamara, J. (2005). Media content analysis: Its uses, benefits, and best practice methodology. *Asia Pacific Public Relations Journal*, 6(1), 1–34.
- McLaughlin, M., & Devoogd, G. (2004). Critical literacy as comprehension: Expanding reader response. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 48(1), 52–62. <https://doi.org/10.1598/JAAL.48.1.5>
- Madhok, S. (2005). Autonomy, political literacy, and the "social woman": Towards a politics of inclusion. In C. Bates & S. Basu (Eds.), *Rethinking Indian political institutions*. London: Anthem Press.

- Hopkins, N., & Coster, W. (2019). The Levellers, political literacy, and contemporary citizenship education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 68–81. <https://doi.org/10.1177/1746197918760084>
- Margetts, H. (2019). Rethinking democracy with social media. *The Political Quarterly*, 90, 107–123.
- Martino, G. D. S., Cresci, S., Cedeno, A.-B., Yu, S., Di Pietro, R., & Nakov, P. (2020). A survey on computational data detection. *IJCAI*.
- Mayo, P. (2015). *Hegemony and education under neoliberalism: Insights from Gramsci*. New York: Routledge.
- McDaniel, C. (2004). Critical literacy: A questioning stance and the possibility for change. *The Reading Teacher*, 57(5), 472–481.
- Mendoza, M. E. H. (2022). Philippine elections 2022: TikTok in Bongbong Marcos' presidential campaign. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 44(3), 389–395.
- Metrum. (2023). Universitas Pasundan, Gramedia, dan Al@S gelar diskusi buku *Bungkam Suara* karya JS Khairen. Retrieved from <https://metrum.co.id/universitas-pasundan-gramedia-dan-als-gelar-diskusi-buku-bungkam-suara-karya-js-khairen/>
- Mizanstore. (n.d.). *30 Paspur: The Peacekeepers Journey*. Retrieved from https://mizanstore.com/30_paspur_the_peacekeepers_journey_57724
- Moss, G. (2015). Internet governance, rights, and democratic legitimacy. In *Handbook of Digital Politics* (pp. 377–394). Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14(2).
- Muñiz-Velázquez, J. A. (2023). (Dis)information literacy: A democratic right and duty of all citizens. *Media and Communication*, 11(2), 1–4.
- Murray, M. C., & Pérez, J. (2014). Unraveling the digital literacy paradox: How higher education fails at the fourth literacy. *Issues in Informing Science and Information Technology*, 11, 85–100.
- Mus, M., & Suparman, S. (2018). Analisis feminisme radikal novel *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 3(1).
- Nandy. (2023). Review novel *Bungkam Suara* karya JS Khairen. Retrieved from <https://www.gramedia.com/best-seller/review-novel-bungkam-suara-karya-js-khairen/>
- Nudin, L. S., Putro, S. S., & Yusar, D. (2021). Analisis poskolonial pada novel *Tak Ada Esok* karya Mochtar Lubis. *Media Bahasa, Sastra, dan Budaya Wahana*, 27(1).
- Pérez-Escolar, M., Lilleker, D., & Tapia-Frade, A. (2023). A systematic literature review of the phenomenon of disinformation and misinformation. *Media and Communication*, 11(2), 76–87. <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6453>
- Rahmawati, N. A. (2022). Computational propaganda on TikTok as the 21st-century propaganda model. *International Review of Humanities Studies*, 7(1), 255–264.
- Stake, R. E. (2000). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research: Third edition*. California: SAGE Publications.
- Sambodja, A. (2008). Peta politik sastra Indonesia. *Jurnal Ilmu Susastra dan Budaya*, 4(2), 258–284.
- Schradie, J. (2015). Silicon Valley ideology and class inequality: A virtual poll tax on digital politics. In *Handbook of Digital Politics* (pp. 1–16). Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus pendidikan kritis (*Critical Pedagogy*) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).

- Susskind, J. (2018). *Future politics: Living together in a world transformed by tech*. Oxford: Oxford University Press.
- Sutisna, A. (2017). Strategi peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2).
- Syaefullah, F., & Perdana, A. (2019). Critical discourse analysis of hoax on primordial issues in the Jakarta gubernatorial election 2017. *Proceedings of the 1st International Symposium on Indonesian Politics, SIP 2019, 26–27 June 2019*.
- Taum, Y. Y. (2020). *Sastra dan politik: Representasi tragedi 1965 dalam negara Orde Baru*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- UNESCO. (2014). Teaching and learning: Achieving quality for all. *EFA Global Monitoring Report, 2013/4*. Paris: UNESCO.
- Utama, M. R. D. (2024). Penulis J.S. Khairen lakukan bedah buku di Unand. Retrieved from <https://sumbar.antaraneews.com/berita/157769/penulis-js-khairen-lakukan-bedah-buku-di-unand>
- Utami, P. (2018). Hoax in modern politics: The meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 85–97.
- We Are Social. (2022). Digital 2022: Another year of bumper growth. Retrieved from <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2).
- Widjayanto, F., Naim, S., & Mokodenseho, S. (2022). Ma'ruf Amin's political communication strategy in the 2019 election campaign: A lesson for anti-hoax politics. *Jurnal Wacana Politik*, 7(2), 108–119.
- Williams, O. A. (2022). Critical literacy in practice: How educators leverage supports and overcome challenges to enact critical literacy pedagogy in their classrooms. *Literacy Research: Theory, Method, and Practice*, 71(1), 323–340. <https://doi.org/10.1177/23813377221115190>
- Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2017). Computational propaganda worldwide: Executive summary.